

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kabupaten KepulUn Meranti awali dengan jual beli dengan Tarif 5%
2. Pemungutan BPHTB tentang jual beli Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah transaksi yang sering terjadi dalam Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Sistem yang digunakan dalam pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah *self assesment* yaitu sistem pemungutan yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan pajak terutang, menghitung, melapor, dan menyetor, langsung ke bank rakyat indonesia (BRI)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Saran

Setelah memperlihatkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran dan harapan , sekiranya dapat berkontribusi untuk daerah kabupaten kepulauan meranti adapun saran penulis adalah :

1. Kebijakan mengenai pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus didasarkan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah saja, namun harus bermanfaat bagi masyarakat luas
2. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Meranti tidak tahu tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh karena itu pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah agar mensosialisasikan kepada masyarakat apa manfaat membayar pajak BPHTB